

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**CHOIRUNNISA  
168330114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**CHOIRUNNISA  
168330114**

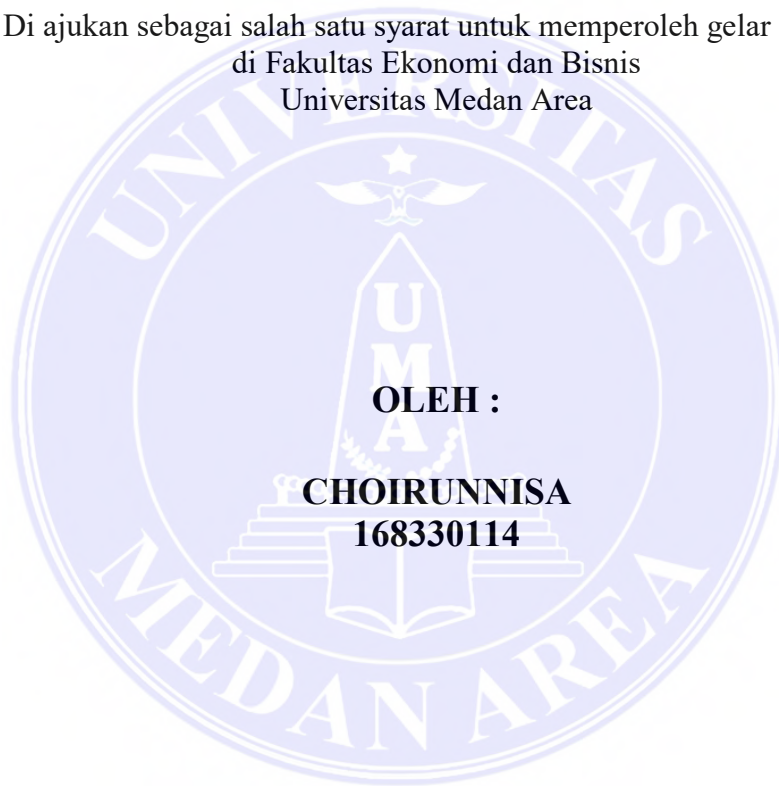


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**PENGARUH PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN  
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area



**OLEH :**

**CHOIRUNNISA  
168330114**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan  
Nama : **CHOIRUNNISA**  
NPM : 16.833.0114  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

  
(Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE., MMA)

Pembimbing

Mengetahui :



  
(Teddi Pribadi, SE., MM)

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)

Ka. Prodi Akuntansi

19/04/20

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 11/November/2020

## **HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan**”, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pecabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 November 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



**CHOIRUNNISA**  
**NPM. 16.833.0114**



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirunnisa  
NPM : 16.833.0114  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 11 November 2020  
Yang menyatakan,



**CHOIRUNNISA**  
**NPM. 16.833.0114**

## RIWAYAT HIDUP

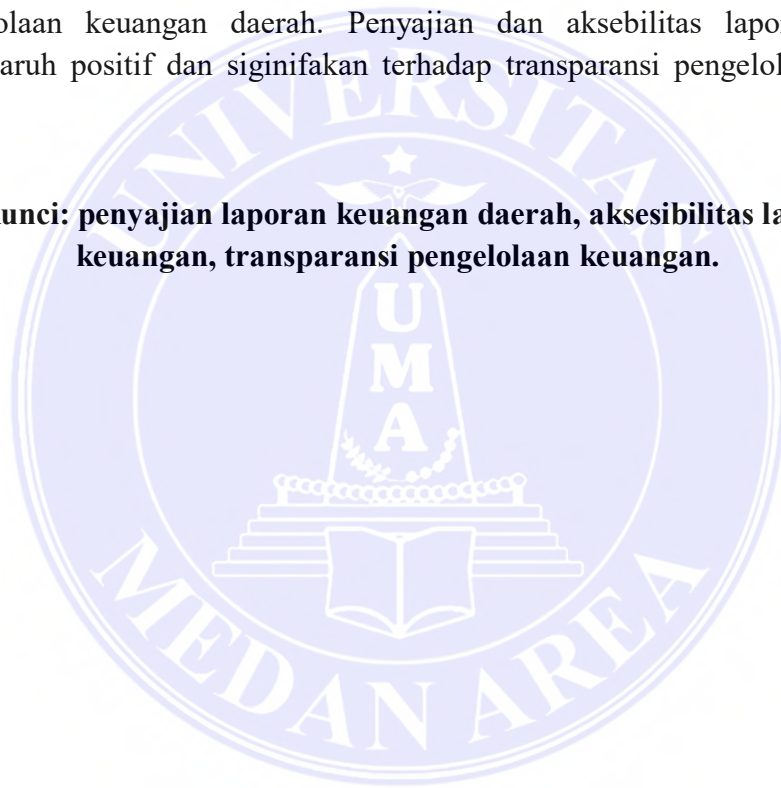
Peneliti dilahirkan di, Kecamatan , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 17 November 1997 dari ayah Marahombang dan ibu Gusriana. Peneliti merupakan putri kandung dari 5 bersaudara. Tahun 2016 peneliti lulus dari, dan pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Medan Area.



## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Padangsidempuan. Jenis penelitian menggunakan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 OPD Pemerintah Kota Padangsidempuan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Maka didapat jumlah sampel sebanyak 64 pejabat struktural. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tranparansi pengelolaan keuangan daerah. Penyajian dan aksebilitas laporan keuangan bepengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci: penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, transparansi pengelolaan keuangan.**

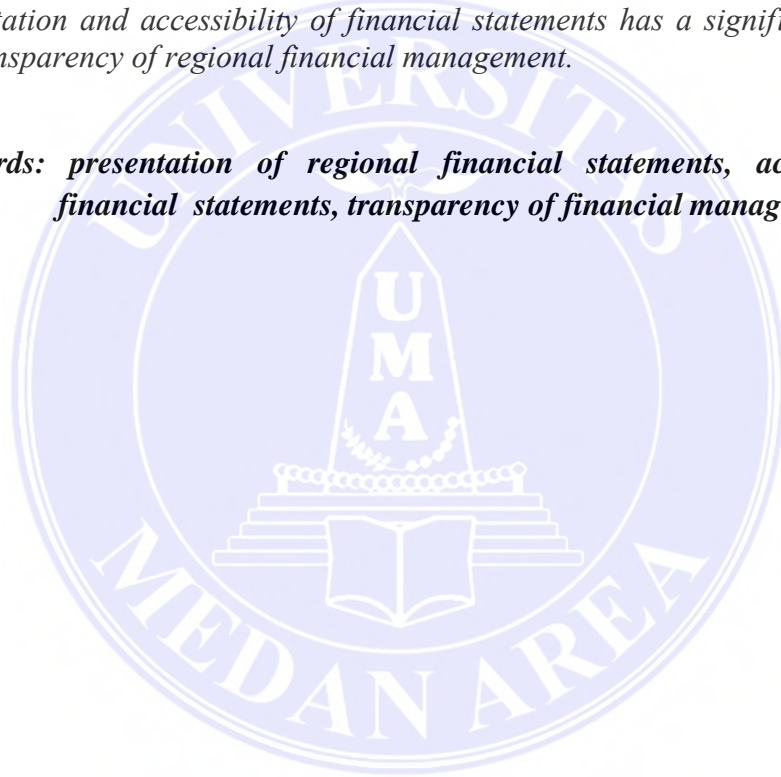




## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of the presentation and accessibility of financial reports on the transparency of the financial management of the Padangsidempuan local government. This type of research uses causal associative. The population in this study was 32 OPD of Padangsidempuan City Government. Sampling used a purposive sampling method. Samples were selected based on certain criteria so that they could support this research. Then the sample size was 64 people. Data analysis techniques used are descriptive statistics, validity and reliability of data, classical assumptions, multiple linear regression, correlation coefficients and the coefficient of determination using the SPSS application. The results of this study indicate that partially the presentation and accessibility of financial statements significantly influence the transparency of regional financial management. Simultaneously or simultaneously the presentation and accessibility of financial statements has a significant effect on the transparency of regional financial management.*

**Keywords:** *presentation of regional financial statements, accessibility of financial statements, transparency of financial management.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriringan salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak dan semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Dengan tekad dan niat yang kuat dan mantap akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Padangsidempuan”. Semua ini tidak terlepas dengan berkat dari Allah SWT dan juga dukungan dari berbagai pihak yang selalu tulus memberikan motivasi dan segalanya kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr.Ihsan Effendi.Msi, selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani,SE, Ak,M.Acc.selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hj.Sari Bulan Tambunan SE, MMA, selaku Dosen Pembimbing I. Ibu Hasbiana Dalimunthe SE, M.Ak selaku ketua siding. Bapak Ilham Ramadhan Nasution SE, M.Si, Ak.Ca, Selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani,SE, Ak,M.Acc. selaku Sekretaris yang telah membimbing,

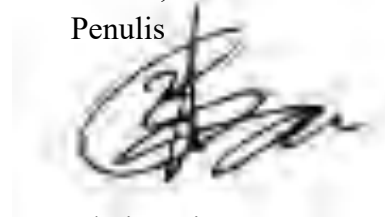
memberikan kepercayaan, dorongan, saran dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah.
6. Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang telah bersedia membantu pengisian kuesioner pada penulisan skripsi ini, semoga skripsi saya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
7. Ayahanda tercinta Marahombang dan ibunda tercinta Gusrianyang telah memberikan motivasi serta dukungan untuk peneliti baik moril maupun materil dan selalu mendoakan sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman – teman seperjuangan Akuntansi B16 dari awal masuk kuliah sampai tamat kuliah.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan, maka dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka peneliti menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, 18 November 2020

Penulis



Choirunnisa

NPM : 168330114

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1. Teori Teori .....	7
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	7
2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah .....	10
2.1.3 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	13
2.1.4 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	15
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	17

2.3	Kerangka Konseptual.....	19
2.4	Hipotesis .....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	22
3.2	Tempat Penelitian .....	22
3.3	Waktu Penelitian.....	22
3.4	Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
3.4.1	Populasi.....	23
3.4.2	Sampel .....	23
3.5	Defenisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel .....	24
3.5.1	Defenisi Operasional .....	24
3.5.1.1	Penyajian Laporan Keuangan Daerah .....	24
3.5.1.2	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah.....	26
3.5.1.3	Transparansi Laporan Keuangan Daerah.....	27
3.5.2	Pengukuran Variabel .....	29
3.6	Jenis Data dan sumber Data.....	29
3.6.1	Jenis Data.....	29
3.6.2	Sumber Data .....	29
3.7	Metode Pengumpulan Data.....	29
3.8	Analisi Data .....	30
3.8.1	Uji Validitas dan Reabilitas .....	30
3.8.1.1	Uji Validitas.....	30
3.8.1.2	Uji Reabilitas .....	31
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.8.2.1	Uji Multikolinieritas .....	32
3.8.2.2	Uji Heteroskedastisitas .....	32
3.8.2.3	Uji Normalitas.....	33
3.8.3	Pengujian Hipotesis .....	33
3.8.3.1	Uji Regresi Linier Berganda .....	33



## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

4.1	Data Penelitian .....	35
4.1.1.	Sejarah singkat Kota Padangsidimpuan.....	35
4.1.2.	Letak Geografis .....	36
4.2	Analisis Data .....	36
4.3	Identitas Responden.....	37
4.4	Presentase Jawaban Responden .....	38
4.5	Uji Kualitas Data .....	43
4.5.1	Uji Validitas.....	44
4.5.2	Uji Realibilitas .....	44
4.6	Uji Asumsi Klasik .....	45
4.6.1	Uji Normalitas .....	45
4.6.2	Uji Multikolenieritas.....	47
4.6.3	Uji Heterokedastisitas .....	48
4.7	Uji Hipotesis.....	49
4.7.1	Uji Regresi Linier Berganda .....	49
4.7.2	Uji Signifikan secara parsial (Uji T).....	50
4.7.3	Uji Signifikan secara simultan (Uji F).....	51
4.7.4	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	53
4.8	Pembahasan .....	54

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan .....	57
5.2	Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

**58**

## **LAMPIRAN.....**

**64**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran Pemerintah Kota Padangsidempuan .....	1
Tabel 1.2 Opini LKPD Kota Padangsidempuan .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	22
Tabel 3.2 Sampel.....	24
Tabel 3.3 Wilayah Penelitian.....	24
Tabel 3.4 Variabel penelitian dan Defenisi Operasional .....	27
Table 4.1 Usia Responden.....	37
Table 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	37
Tabel 4.3 Pendidikan Responden.....	38
Tabel 4.4 Persentase jawaban variabel X1 Penyajian Laporan Keuangan .....	38
Tabel 4.5 Persentase Jawaban Variabel X2 Aksesibilitas laporan keuangan .....	40
Tabel 4.6 Persentase Jawaban Variabel Y Transparansi Laporan Keuangan .....	42
Tabel 4.7 Uji Validitas .....	43
Tabel 4.8 Uji Realibilitas .....	44
Table 4.9 Uji Klomogorov Smirnov .....	46
Tabel 4.10 Uji Multikolenierias .....	47
Tabel 4.11 Analisis Regresi Linier Berganda .....	48
Tabel 4.12 Uji Parsial (Uji T) .....	50
Tabel 4.13 Uji simultan (Uji F).....	51
Tabel 4.14 Uji Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka koneptual .....	20
Gambar 4.1 Gambar Grafik Histogram.....	45
Gambar 4.2 Gambar P.Plot Normalitas.....	45
Gambar 4.3 Gambar Scatterplot.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	64
Lampiran 2 <i>Output</i> Master Data Variabel.....	67
Lampiran 3 <i>Output</i> Hasil Uji Statistik .....	71
Lampiran 4 <i>Output</i> Hasil Penelitian.....	79
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	80
Lampiran 6 Surat Selesai penelitian.....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan nasional dan merupakan unsur kunci dalam penyelenggaraan sistem tersebut, yang dapat mengoptimalkan potensi pembangunan suatu daerah dan mencapai tujuan peningkatan kualitas pembangunan. Bentuk khusus untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan Negara Tahun 2003, yang mensyaratkan pelaksanaan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus disusun dengan dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan**

Tahun	Anggaran
2016	772.126.268.720
2017	885.994.914.541
2018	867.951.022.393
2019	879.748.745.321

Berdasarkan tabel Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengajukan anggaran yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Peneliti menemukan adanya permasalahan utama dalam Pengolahan keuangan daerah Padangsidimpuan, yaitu pada tahun 2017, dikutip dari berita Antara Indonesia, Pemerintah Padangsidimpuan Sisa Laporan Penggunaan Anggaran (SILPA) Pemkot Padangsidimpuan TA 2017 sebesar Rp24 miliar lebih dana tersebut tidak terserap



100 persen. Devisit keuangan ini diuraikan sebagai berikut; uraian realisasi pendapatan Rp862.455.261.770,55, kemudian untuk realisasi belanja Rp833.862.860.721,00. Untuk pembiayaan realisasi penerimaan Rp5.203.211.890,46 kemudian pengeluaran Rp9.284.683.506,00, sehingga Pemko Padangsidimpuan mengalami defisit sebanyak Rp4.081.471.615,54. Kemudian, sisa anggaran Pemko Padangsidimpuan tahun 2017 sebesar Rp.24.510.929.434,01.

Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan menolak member opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Data Laporan hasil Pemeriksa (BPK) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padangsidimpuan serta temuannya dari tahun 2014-2018 disajikan dalam table 1.1

**Tabel 1.1**  
**Opini LKPD Kota Padangsidimpuan**

<b>Tahun</b>	<b>Opini</b>
2014	WDP
2015	WDP
2016	WDP
2017	WDP
2018	WDP

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) permasalahan yang terjadi pada LKPD Kota Padangsidimpuan adalah penyajian asset tetap yang belum akurat yang dimana pencatatan asset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap yang bersumber

dari dan BOS. Dan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menetapkan kebijakan daerah terkait pemanfaatan kependudukan.

Peneliti melihat adanya permasalahan pemerintah kota Padangsidempuan dalam pengefektivan anggaran tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan kurang adanya transparansi efektivitas anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Padangsidempuan dalam pembangunan daerah Padangsidempuan, Transparansi merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi, dan jika masyarakat atau pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi tersebut maka harus memuat informasi yang jelas. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi merupakan asas yang menjamin bahwa setiap orang memiliki atau bebas mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan., yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Pemerintah harus mematuhi undang-undang yang berlaku saat mengelola sumber daya. Akuntabilitas adalah elemen yang berbeda, tetapi merupakan unit yang tidak dapat dipisahkan. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak di sertai dengan transparansi maka keuangan daerah tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal (Hehanussa, 2015).

Salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Karena kegiatan pemerintah berada dalam lingkup pelaksanaan tanggung jawab masyarakat, maka pemerintah harus dapat menyediakan kepada publik segala

informasi keuangan yang relevan, jujur dan terbuka. Penelitian ini mengkaji pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, dan diperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006; Hehanussa, 2015).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara yang mudah bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Fauziah, 2017: 4). Sedangkan menurut Mustofa (2012: 3) aksesibilitas adalah proses pengungkapan laporan keuangan untuk konsumsi publik. Hak publik untuk mengakses informasi keuangan bermula dari konsep akuntabilitas publik (Hahenusssa, 2015: 84). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara mudah bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Efektifitas penggunaan informasi keuangan bergantung pada pembacaan dan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan (Sanjaya et al., 2014: 4).

Peneliti sebelumnya Nabila Ayu (2018) melakukan penelitian tentang ekspresi pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntabilitas yang dipengaruhi oleh ekspresi laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan daerah berdampak positif terhadap transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, namun tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **“Pengaruh Penyajian Laporan dan Aksesibilitas**

## **Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Padangsidimpuan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis di bidang akuntansi sektor publik dan mengenai penyajian laporan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang sama.
3. Bagi pemerintah daerah Kota Padangsidempuan, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam hal penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah.





## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### 2.1 Teori Teori

##### 2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pembiayaan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemerintahan daerah yang mengelola segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dalam mata uang dan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Pasal 293 dan 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tugas pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan pemerintah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004, dalam rangka menyelesaikan permasalahan di pemerintahan daerah, hal ini menjadi dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah dalam "UU No. 23" 2014 menjadi kebijakan pemerintah daerah berdampak signifikan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemerintah daerah (termasuk regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah).

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengutip peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perbendaharaan, Nomor Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Nasional dan Pemeriksaan Akuntabilitas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, “Peraturan Pemerintah” ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya tentang “Pengelolaan Keuangan Daerah” dalam “Peraturan Pemerintah” Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan tersebut juga telah disempurnakan untuk menjaga tiga (tiga) pilar pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka “Peraturan Pemerintah” ini meliputi pengaturan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab keuangan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan Pemerintah ini dimulai dengan pembentukan KUA. untuk menentukan proses penyusunan APBD. Dan PPAS, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya RKA SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada APBD dan kemudian Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pimpinan Daerah tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas guna mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, draf Perda dan draf Perkada diserahkan ke gubernur untuk

dievaluasi sebagai wakil pemerintah pusat / daerah atau menteri provinsi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rancangan Perda dan rancangan Perkada telah sesuai dengan dokumen pendukung, kemudian dijadikan dasar bagi kepala daerah untuk menyusun rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD. Rancangan Perkada tersebut akan menjadi uraian rinci Perkada tentang APBD.

Indikator kinerja APBD telah dimasukkan ke dalam format RKA, namun selama ini pembahasan anggaran di pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada jumlah uang yang dikeluarkan daripada keluaran dan hasil yang ingin dicapai. Sebagaimana disebutkan di atas, anggaran metodologi kinerja lebih menitikberatkan pada keluaran dan hasil kegiatan.

#### 1. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan dan pengelolaan dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan kinerja yang ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus memenuhi indikator kinerja yang disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, perencanaan dan anggaran dapat disesuaikan secara tepat, dan jumlah kesalahan dalam pelaksanaan dan proses pengelolaan dapat diminimalisir.

#### 2. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Sistem akuntabilitas keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Mengenai keberadaan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyiapkan paling sedikit 7 (tujuh) laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasi, laporan perubahan neraca kelebihan anggaran, laporan perubahan ekuitas, arus kas. laporkan dan laporkan catatan.

### 2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan sektor publik merupakan hasil transaksi pemerintah berdasarkan status keuangan (Hehanussa, 2015: 83), oleh karena itu laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah harus memuat informasi yang relevan, jujur dan terbuka (Sumiyati, 2015). : 3). Laporan keuangan sektor publik merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik kepada masyarakat.

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang status keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelapor. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Sanjaya dkk (2014:8) mengemukakan tujuan umum laporan keuangan antara lain:

1. memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban, dan hak kepentingan pemerintah;
2. memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan status ekuitas pemerintah;
3. memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. memberikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. memberikan informasi tentang potensi pemerintah untuk membiayai pengelolaan kegiatan pemerintahan;

7. memberikan informasi yang membantu menilai kemampuan entitas pelapor untuk mendanai aktivitasnya.

Pernyataan 17 dalam PP No. Pernyataan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa informasi yang diberikan dalam Laporan Keuangan Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, pelaporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap kelompok pengguna. Laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah berisi informasi yang menggambarkan status keuangan pemerintah daerah selama periode pelaporan tahunan, dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pengguna pemerintah (Saputra 2012).

Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Laporan keuangan adalah laporan keuangan bertujuan umum, disusun atas dasar kas untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, transfer dan proyek pendanaan, dan atas dasar akrual untuk mengakui proyek aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Didesain untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

Yang disebut pengguna merujuk pada publik, legislatif, lembaga pemeriksa / pengawas, pihak yang menyediakan atau berperan dalam proses pendanaan, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Laporan keuangan mencakup konten



yang diperkenalkan dalam laporan keuangan yang disampaikan secara terpisah atau bagian dari laporan keuangan dalam dokumen publik lainnya (seperti laporan tahunan).

Dalam "Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah" (PSAP) 1, paragraf 49 (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010) disebutkan bahwa neraca harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; pajak dan Piutang bukan pajak Dana; saham; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan dana saham.

Ruang lingkup pengawasan PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas. Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini pada Oktober 2010, seluruh entitas pelapor pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan SAP berbasis akrual, namun bagi entitas pelapor yang belum siap sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual, pada tahun 2014 sebelum tahun, SAP berbasis uang tunai masih diizinkan untuk mengakumulasi pendapatan mereka. Hal ini dijelaskan dalam PP, yaitu, SAP berbasis kas terakumulasi, yaitu SAP mengakui pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan berbasis kas, dan mengakui aset yang masih harus dibayar, hutang, dan ekuitas modal.

Pasal 7 mengatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara berjenjang. Peraturan mengenai penerapan SAP secara bertahap di pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. . Kementerian Dalam Negeri.

### **2.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah**

Dari perspektif spasial, aksesibilitas mengacu pada kondisi atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lain, atau kemudahan orang atau kendaraan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, dan dengan kecepatan yang wajar (Rohman, 2009) . Aksesibilitas laporan keuangan merupakan cara mudah untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Hak publik untuk memperoleh informasi keuangan merupakan hasil dari konsep tanggung jawab publik. Akuntabilitas publik mengharuskan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti akuntabilitas dan manajemen (Mardiasmo 2009: 171).

Terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan dan Belanja Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 103 mengatur bahwa informasi yang terkandung dalam sistem informasi keuangan daerah adalah data publik yang dapat dipahami, diakses, dan diperoleh masyarakat. Artinya, pemerintah daerah harus memiliki akses publik ke berbagai pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang mereka hasilkan, seperti menerbitkan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain.

Pelaporan keuangan pemerintah juga merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Metode efektif dalam memperoleh informasi bergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban dan pemahaman serta penggunaan informasi tersebut (Sanjaya et al., 2014: 4) .). Hak akses yang diberikan oleh media seperti koran, majalah, radio, stasiun TV dan website (internet), serta forum yang memberikan perhatian langsung dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab secara sosial (Shende dan Bennet, 2004, Wahyuni, 2014): 3 ). (2017: 4) mengemukakan bahwa agar

informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya dengan mencapai tujuan sebagai berikut::

1. Keterbukaan, artinya laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
2. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Akses tanpa hambatan (*Accesible*), yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (website).

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Aksesibilitas organisasi sektor publik dapat ditingkatkan melalui Permendagri No.3 Tahun 2017 (Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi) Kemendagri dan pemerintah daerah yang dimana bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab;
2. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi dan dokumentasi berkualitas tinggi.

Agar informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD, tetapi juga mendorong pemahaman masyarakat luas. masyarakat. Menemukan atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Aliyah dan Nahar, 2012).

### **2.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi adalah bahwa publik memiliki hak untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan mematuhi peraturan perundang-undangan (SAP, 2005). Transparansi publik mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban untuk merumuskan kebijakan publik secara publik dengan memperoleh dan memberikan informasi yang benar, jujur dan non-diskriminatif kepada publik, terlepas dari apakah masyarakat membutuhkannya (Pandji, 2008): 56).

Transparansi menurut Mardiasmo (2009: 30) adalah sebagai berikut: “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyusun kebijakan keuangan daerah agar DPRD dan masyarakat dapat memahami dan mengawasi.” Transparansi merupakan salah satu ciri kebaikan sebuah Tata Kelola. Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk memperoleh informasi yang berlaku dengan adanya kepentingan public yang secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, transparansi dapat didasarkan pada hak publik untuk secara terbuka dan menyeluruh memahami tanggung jawab pemerintah

dalam mengelola sumber daya yang dipercaya dan dikelola, sehingga dapat memberikan keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. informasi. Mematuhi hukum dan peraturan.. Prinsip Transparansi pada Pemerintahan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Adanya sistem keterbukaan dan terstandarisasi yang jelas dan mudah dipahami serta dapat dipahami dari semua proses yang dikelola oleh pemerintah.
2. Adanya mekanisme bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur administrasi pemerintahan.
3. Adanya mekanisme untuk melaporkan dan menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran pejabat publik dalam kegiatan administrasi pemerintahan.

Transparansi dilandasi oleh kebebasan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat. Artinya, informasi terkait kepentingan publik bisa langsung didapatkan oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). Transparansi dapat berarti tidak hanya menghasilkan laporan tahunan, tetapi juga menjadikannya publik dan dapat diakses oleh publik, karena kegiatan pemerintah dilakukan dalam lingkup tugas masyarakat.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

### **Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dedy Aries Poae (2013)	Pengaruh Penyajian Laporan	Pengaruh Penyajian Laporan	Penyajian Laporan



		Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud	Keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas (X2), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya secara bersama-sama atau serentak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud
2	Charli Andreas Saragih (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Riyan Eriko Zama (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsweu	Penyajian Laporan Keuangan daerah (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2), Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Pringsweu (Y)	Penyajian laporan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah baik secara parsial ataupun secara bersamaan.
4	Superdi (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,	Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas



		Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntansibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sijunjung)	Laporan Keuangan (X2), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3), Akuntansibilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi aksesibilitas maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
5	Nabila Ayu Indria (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akasesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), Akasesibilitas Laporan Keuangan (X2), Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Mardiasmo (2004: 37) berpendapat bahwa pengenalan laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

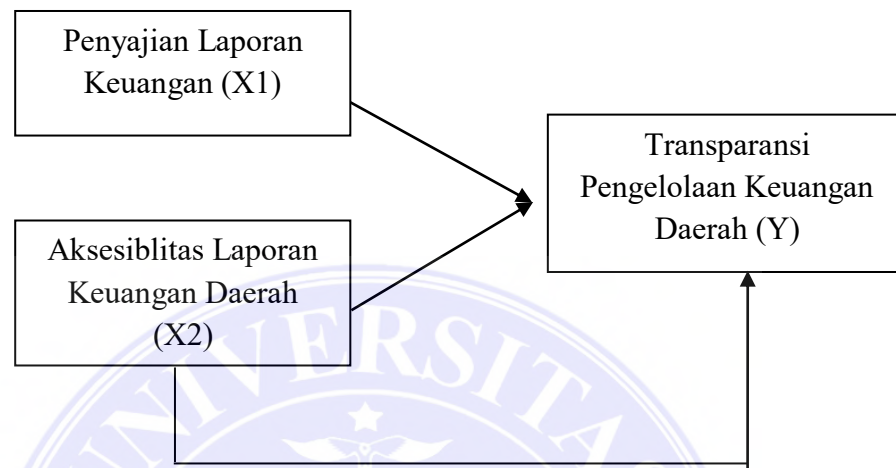
- a) Memberikan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta bukti akuntabilitas dan hak pengelolaan.

- b) Memberikan informasi untuk mengevaluasi manajemen dan kinerja organisasi.

Pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan peraturan menteri meliputi kewenangan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD di daerah yang belum dibentuk DPRD. , pelaksanaan APBD, dan perubahan APBD, pengelolaan kas, pengelolaan keuangan, akuntansi keuangan daerah, tanggung jawab pelaksanaan APBD, pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan pemberian otonomi daerah / daerah perkotaan, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mengelola desentralisasi secara transparan, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab. Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi sangat penting terutama pada bidang anggaran, akuntansi dan audit yang perlu diutamakan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada konsep “value for money” (VFM). Pengelolaan keuangan daerah dengan konsep PKS adalah memastikan pengelolaan dana publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya akuntabilitas publik tercapai (Soesastro 2005: 553)

Kerangka konseptual berikut menjelaskan hubungan antara penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah.:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> :Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>2</sub> :Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>3</sub>:Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kausal asosiatif. “Desain kausal dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel penelitian, dan juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel mempengaruhi variabel lain” (Umar, 2003: 30).

#### 3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan di Wek II, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, 22711

#### 3.3 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dari bulan oktober 2019 sampai dengan bulan mei 2020.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian							
		2019		2020					
		Okt	Nov Des	Jan Feb	Mar Apr	Mei Jun	Jul Aug	Sep Okt	Nov
1.	Pengajuan Judul								
2.	Bimbingan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Pengumpulan dan Analisis Data								
5.	Bimbingan Skripsi								
6.	Seminar Hasil								
7.	Pengajuan dan Sidang Meja Hijau								

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah suatu wilayah luas yang terdiri dari objek atau topik yang ditentukan oleh peneliti dan mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang disebut dengan variabel (Sugiyono, 2010). Antara populasi umum dan populasi sasaran. Populasi sasaran adalah populasi sasaran untuk merumuskan kesimpulan penelitian kami (Sukirman, 2012). Berdasarkan uraian di atas, populasi umum dalam penelitian ini adalah 32 organisasi perangkat daerah (OPD), namun sasarannya adalah pejabat struktural.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2010:18). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diperoleh berasal dari sumber yang sengaja dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabat struktural yang menjabat sebagai kepala dinas dan kasubbag keuangan dan perencanaan di masing-masing OPD
2. Masa kerja minimal selama 1 tahun kerja dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Adapun sampel dalam penelitian ini :



**Tabel 3.2**  
**Jumlah Sampel**

No	Nama Instansi	Jumlah Instansi		Banyak sampel	Jumlah
1	Dinas	22	x	2	46
2	Badan	5	X	2	10
3	Sekretariat	2	X	2	4
4	Kantor	2	X	2	4
5	Inspektorat	1	X	2	2
Jumlah					64

**Tabel 3.3**  
**Wilayah Penelitian**

No	Nama Instansi
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang
4	Dinas Sosial
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Dinas Ketenagakerjaan
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Dinas Ketahanan Pangan
9	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kota
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu
16	Dinas Perpustakaan
17	Dinas Pertanian
18	Dinas Pariwisata
19	Dinas Perdagangan
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	Rumah Sakit Umum
22	Satuan Polisi Pamong Praja
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Keuangan Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Badan Penanggulangan Daerah
27	Badan Pusat Statistik
28	Sekretariat Daerah
29	Sekretariat DPRD
30	Kantor Lingkungan Hidup
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Inspektorat Daerah



### 3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.5.1 Defenisi Operasional

Berdasarkan desain penelitian asosiasi kausal (desain penelitian menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen), variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

##### 3.5.1.1 Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan lampiran II PP No. 24 Tahun 2005 kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan poin 32-37 bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Indikator dari penyajian laporan keuangan menurut IAI (2011) adalah sebagai berikut ini:

1. Kualitas penting dari informasi yang dimuat dalam laporan dapat dimengerti  
Keuangan adalah kenyamanan yang langsung dipahami pengguna. Informasi keuangan yang dapat dimengerti adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai untuk pemahaman pengguna.
2. Informasi yang relevan dengan kualitas yang relevan, asalkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang atau masa depan, mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu mereka

### 1. Memiliki manfaat umpan balik

Informasi memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu

### 2. Tepat Waktu

Informasi akan ditampilkan pada waktu yang tepat untuk memberikan pengaruh dan membantu dalam pengambilan keputusan

### 3. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. Andal, Informasi yang andal dan dapat diandalkan, jika tidak ada gagasan yang menyesatkan, kesalahan besar, dan dapat dipercaya oleh pengguna, informasi tersebut harus mewakili konten yang harus disajikan dan / atau diharapkan secara wajar untuk disajikan dengan cara yang benar atau tepat.

### 1. Penyajian Jujur

Informasi tersebut benar-benar menjelaskan transaksi dan peristiwa lain yang harus ditampilkan atau yang diharapkan dapat ditampilkan secara wajar.

### 1. Netralitas

Informasi diserahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2. Dapat dibandingkan, informasi akuntansi yang dapat diperbandingkan harus dapat dibandingkan dengan informasi akuntansi sebelumnya dari perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang serupa dalam periode yang sama.

### 3.5.1.2 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Dalam penelitian ini aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan variabel bebas (X2). Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan hak akses kepada pemangku kepentingan untuk mencari atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi pemangku kepentingan. Aliyah dan Nahar (2012) mengemukakan bahwa aksesibilitas dari segi spasial berkaitan dengan kondisi atau ketersediaan dari satu tempat ke tempat lain, atau bahwa orang atau kendaraan dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman dan di satu tempat. . Kecepatan yang wajar. Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah memudahkan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas merupakan kemudahan bagi para pihak dalam menggunakan laporan keuangan untuk mencari informasi keuangan daerah. Indikator aksesibilitas laporan keuangan adalah hak akses yang diberikan oleh surat kabar, majalah radio, stasiun televisi, dan website serta forum yang menyediakan perhatian langsung.

### 3.5.1.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada penelitian ini transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah variable dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah adanya kebebasan untuk mengakses informasi keuangan yang terbuka dan jujur secara menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini berasal dari Hanim (2009). Ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Pengelolaan Keuangan dilakukan melalui sistem pengendalian internal yang memadai.
2. Penyebarluasan informasi tentang pengambilan keputusan, melalui media massa, media nirmassa, dan maupun media komunikasi personal.
3. Adanya akurasi maupun kelengkapan informasi yang berkaitan dengan caramencapai sasaran suatu program.
4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang dicapai oleh pemerintah.
5. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atau penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan pelayanan.

**Tabel 3.4**

**Variabel penelitian dan Definisi Operasional**

No	Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	<p>Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sumber : PP No.24 Tahun 2005</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengendalian intern</li> <li>2. Penyebarluasan informasi</li> <li>3. Akurasi dan kelengkapan informasi</li> <li>4. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil</li> </ol> <p>Mekanisme pelaporan</p> <p>Sumber :Hanim, 2009</p>	Likert

2	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X1)	Penyajian laporan keuangan daerah adalah penyajian laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan yang terdiri atas LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki umpan balik</li> <li>2. Tepat waktu</li> <li>3. Lengkap</li> <li>4. Penyajian jujur</li> <li>5. Netralitas</li> <li>6. Dapat dibandingkan</li> <li>7. Dapat dipahami</li> </ol> <p>Sumber : Sande, 2013</p>	Likert
3	Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X2)	Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi <i>stakeholder</i> untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi <i>stakeholder</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi media masa</li> <li>2. Kemudahan akses laporan keuangan</li> <li>3. <i>Accesible</i></li> </ol> <p>Sumber : Wahdina, 2015</p>	Likert

### 3.5.2 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel menggunakan skala *Likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok terhadap fenomena sosial (Sugiyono, 2006). Skala ini mempunyai jarak dari positif ke negative terhadap objek sikap tertentu.

Skala pengukuran kuisisioner menggunakan skala:

Skor 1 = Sangat tidak setuju

Skor 2 = Tidak setuju

Skor 3 = Netral atau ragu-ragu

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Tidak setuju



### 3.6 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.6.1 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuisioner yang dimana telah diisi oleh responden, yaitu Kepala OPD dan Kasubbag bagian keuangan OPD dari masing-masing OPD yang menjadi sampel penelitian.

#### 3.6.2 Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban-jawaban atas kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah kembali.

### 3.7 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi survei kuesioner, yang dapat memberikan rangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada narasumber. Alat dalam kuesioner tersebut merupakan tiruan dari peneliti sebelumnya yaitu Hanim (2009).

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dan penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner dikirim ke seluruh sampel yang merupakan anggota populasi yang menjadi responden.
2. Setelah satu minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi para responden.
3. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, peneliti kemudian melakukan pengolahan data jika jumlah

kuesioner yang terkumpul melebihi dari 30 tetapi jika data belum mencukupi maka dicoba lagi untuk mengirimkan kuosioner kepada responden yang belum mengembalikan kuosioner.

### 3.8 Analisi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut di distribusikan oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara.

Metode analisis data dalam penelitiann ini menggunakan Uji Validitas dan Realibilitas, Uji Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis, dan Tempat dan Waktu penelitian.

#### 3.8.1 Uji Validitas dan Realibitas

##### 3.8.1.1 Uji Validitas

Dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing kelompok telah dikelompokkan pada variabel yang telah ditentukan (Ghozali, 2016). Uji validitas digunakan untuk menngukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner, apakah pertanyaan yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur dan sesuai dengan apa yang hendak kita ukur. Jika pernyataan pada kuesioner mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dianggap valid (Ghozali 2016). Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa besar dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya.

1. Jika  $r_{hitung}$  positif dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka butir pertanyaan tersebut valid
2. Jika  $r_{hitung}$  negatif atau  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka butir pertanyaan tersebut tidak valid

3.  $r_{hitung}$  dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*

Nilai  $r_{tabel}$  dapat diperoleh melalui  $df$  (*degree of freedom*) =  $n-k$ , dimana :

$n$  = Jumlah responden

$k$  = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variable

### 3.8.1.2 Uji Realibilitas

Jika dua atau lebih pengukuran gejala yang sama dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sama, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner sebagai variabel atau indikator penyusun. Jika seseorang (responden) menjawab pernyataan tersebut secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel atau reliabel (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas *One Shot* atau pengujian sekali saja. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016). Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama dengan hasil uji validitas.

### 3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik atau tidak. Diperlakukannya uji asumsi klasik untuk menghindari bias. Karena tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan yaitu terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

### 3.8.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksud untuk membuktikan apakah terdapat hubungan linier antara variabel independen (multikolinieritas). Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel yang bebas. Multikolinieritas dapat dilihat apabila *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Apabila *tolerance value* dibawah 0,10 atau nilai VIF diatas 10 maka terjadi multikolinieritas.

### 3.8.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk menguji apakah residual model regresi dari satu pengamatan ke pengamatan lain memiliki ketidaksamaan varians. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain konstan disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homogen, tidak homogen. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, salah satunya adalah uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi lebih tinggi dari tingkat kepercayaan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak termasuk heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

### 3.8.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal, sedangkan model regresi yang baik berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti atau mendekati berdistribusi

normal yaitu sebaran data berbentuk lonceng. Data yang dianggap baik adalah data yang berpola seperti berdistribusi normal.

### 3.8.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.8.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

**Y** = Transparansi laporan keuangan daerah

**X1** = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

**X2** = Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah

**A** = Konstanta

**b1, b2** = Koefisien regresi

**e** = error

Uji hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji F, uji koefisien determinasi (R square), uji t.

#### 1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant ( $\alpha$ ) 0,005. Hal ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan X rata-rata di daerah kritis (daerah tolak) apabila hipotesa benar sebesar 0,005. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak berarti ada pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Ghazali, 2016).



## 2. Uji Simultan ( Uji-f)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level of significant ( $\alpha$ ) 0,05. Nilai F hitung yang diperoleh dibandingkan dengan F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi sudah fit (Ghozali, 2016).

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan kecocokan yang menyatakan proporsi dan variasi total Y (variabel dependen) yang dapat diterangkan oleh X (variabel independen) dan sebagai ukuran linier yang menyatakan seberapa baik garis regresi yang cocok dengan data. Besarnya koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 berarti hubungan antar variabel tersebut semakin erat (Ghozali, 2016).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

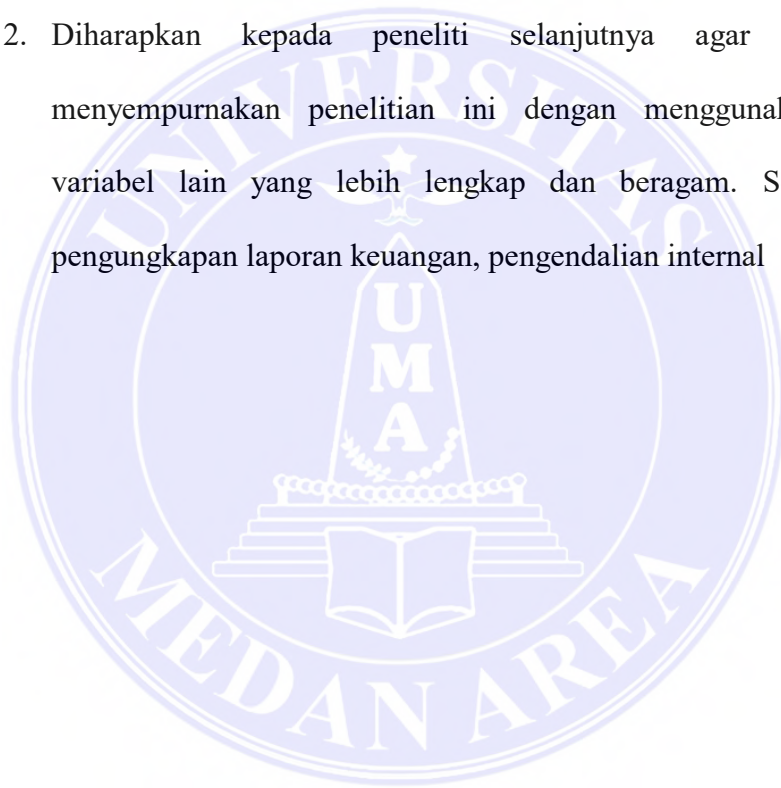
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Padangsidimpuan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur-unsur dari penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan telah terpenuhi. Dengan semakin lengkap dan tepat waktu suatu laporan keuangan maka akan semakin baik transparansi pengelolaan keuangan.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Kota Padangsidimpuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses laporan keuangan, maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan.
3. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Padangsidimpuan.
4. Berdasarkan nilai  $R^2$  sebesar 0.744 berarti 74.4% variabel Transparansi Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh variabel Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. Sedangkan sisanya sebesar 25.6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan agar memberikan akses yang mudah dan jelas kepada setiap pengguna laporan keuangan daerah yang membutuhkan guna untuk meningkatkan transparansi pengelolaan laporan keuangan.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan menggunakan variabel-variabel lain yang lebih lengkap dan beragam. Seperti tingkat pengungkapan laporan keuangan, pengendalian internal



## DAFTAR PUSTAKA

- AliyahSitidanNahar Aida (2012) , *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah TerhadapTransparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*, Jurnal Akuntansi& Auditing, Volume 8, No. 2, Mei 2012: 97-189.
- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- ArifinTahir, 2014, *Kebijakan Publikdan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.Bandung :Alvabeta
- B.e.Supriadi. (2017).*Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Budi Mulyana (2006), *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah danAksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, JurnalAkuntansiPemerintahan, Vol. 2 No. 1.
- Domain Tjahjanulin (2013). *Manajemen Keuangan Publik*. Univeristas Brawijaya. Malang
- Fauziyah,RezaMiftahul. (2017). *Pengaruh Penyajiandan Aksebilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(6): 1-16.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.

- Hanim, Sustika, 2009. “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa)*”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- J,Hehanussa. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT.Refika Aditama. Bandung
- Mulyana Budi, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2 No. 1, Mei 2006
- Permendagri No. 59 Tahun(2007). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Permendagri No 3 Tahun (2017). *Tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah*
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.



2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- PP No. 58 Tahun(2005). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- R, Faristina. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Jurnal Fakultas Ekonomi, , 1.
- Republik Indonesia.(2004). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta
- Republik Indonesia.(2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia.(2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta.
- Rohman, Abdul. (2009). “*Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 9 No 1 Hal 9-14. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sanjaya, Putra I Dewa., Sujana Edydan Sulindawati Ni Luh Gede Erni.(2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, 2(1):1-12. *Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Saputra, Rahmawan,(2012). *Kajian Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

- Sumiyati. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas*. Jakarta
- Soesastro, Hadi.dkk. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir:Proses Pemulihan Ekonomi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiono, 2006.*Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan kedelapan, CV Alfabet, Bandung.
- Tahir Arifin, (2014), *Kebijakan Publikasi dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta
- TanjungAbdul Hafiz. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003) *tentang Keuangan Negara*.Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun (2004) *tentang Perbendaharaan Negara*.Jakarta
- Undang-Undang No. 32, 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.Jakarta
- Wahyuni, Sri Putu.,Sulindawati.,dkk. (2014). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.E-Journal.Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Jakarta.
- Wiyana Anim dan Sutrisna Anna (2014)., *Determinan Aksesibilitas dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper, ISSN 24.

**Lampiran 1**  
**Kuesioner Penelitian**

**KUESIONER PENELITIAN**

**Kuesioner Pengaruh Penyajiandan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah  
Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah  
Daerah Padangsidempuan**

**Kepada Yth : .....**

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata.

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

**( Choirunnisa )**

**Petunjuk Pengisian:**

Mohon Bapak dan Ibu memberikan tanda cek list (  $\checkmark$  ) pada salah satu pilihan jawaban mengenai pernyataan dan pertanyaan yang diberikan sesuai dengan kondisi tempat Bapak dan Ibu bekerja. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 sampai dengan 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan/pertanyaan.

Skor jawaban adalah sebagai berikut:

Keterangan	SangatSetuju (SS)	Setuju (S)	Ragu Ragu (RR)	TidakSetuju (S)	SangatTidak Setuju (SS)
Skor	5	4	3	2	1

### Identitas Responden

Nama : \_\_\_\_\_

Umur : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Perempuan  LakiLaki

Nama OPD : \_\_\_\_\_

Jabatan :  Kepala OPD  Kasub bag Keuangan

Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_

Masa Kerja : \_\_\_\_\_

No	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	SS	S	RR	TS	STS
1	Laporan keuangan Pemko Padangsidempuan memungkinkan pengguna mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.					
2	Laporan Keuangan Pemko Padangsidempuan dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.					
3	Laporan Keuangan Pemko Padangsidempuan selalu disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.					
4	Laporan Keuangan Pemko Padangsidempuan disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.					
5	Laporan Keuangan Pemko Padangsidempuan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.					
6	Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemko Padangsidempuan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemko Padangsidempuan dapat dipahami oleh pengguna karena dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas kemampuan pengguna.					
	<b>Sumber : Atika Rizki, 2015</b>					

No	Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah	SS	S	RR	TS	STS
1	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan daerah.					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)					
4	Laporan keuangan memuat informasi yang sudah seharusnya terpublikasi					
5	Laporan keuangan dapat diakses dimanapun dan kapanpun					
6	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses laporan keuangan					
7	Laporan keuangan daerah tidak dapat di akses melalui media masa dan internet					
<b>Sumber : Nabila AyuIndria, 2018</b>						

No	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	SS	S	RR	TS	STS
1.	.Pengelolaan Keuangandiselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai					
2.	Penyebarluasan laporan Keuangan telah disampaikan melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.					
3.	Terdapat akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan.					
4.	Ada ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai.					
5.	Penyampaian Laporan Keuangantelah melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.					
<b>Sumber : Atika Rizki, 2015</b>						



**Lampiran 2**  
**Output Master Data Variabel**

**Tabulasi Angket**

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TOTAL X1
1	3	3	4	3	3	3	3	22
2	3	3	4	3	3	3	3	22
3	4	4	4	4	4	4	3	27
4	4	4	4	4	4	4	3	27
5	3	3	3	3	3	4	3	22
6	3	3	3	3	3	4	3	22
7	3	3	3	3	3	3	4	22
8	4	4	4	5	4	4	4	29
9	5	4	4	4	4	4	4	29
10	5	4	5	4	4	4	4	30
11	5	5	4	5	5	5	5	34
12	5	5	4	5	5	5	5	34
13	5	5	5	4	4	4	4	31
14	5	5	5	4	4	4	4	31
15	3	3	3	3	3	3	3	21
16	3	3	3	3	3	3	3	21
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	2	4	4	3	3	2	2	20
20	2	4	4	3	3	2	2	20
21	4	4	4	4	4	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	4	28
23	3	3	3	3	3	3	3	21
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	4	4	4	5	5	5	5	32
26	4	4	4	5	5	5	5	32
27	4	4	4	4	4	4	4	28
28	4	4	4	4	4	4	4	28
29	3	3	3	3	3	3	3	21
30	3	3	3	3	3	3	3	21
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	5	5	5	4	4	4	32
34	5	5	5	5	4	4	4	32
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	3	3	3	3	3	3	3	21

38	3	3	3	3	3	3	3	21
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	3	3	3	4	4	4	4	25
42	3	3	3	4	4	4	4	25
43	4	4	4	4	3	3	3	25
44	4	4	4	4	3	3	3	25
45	3	3	3	3	2	2	2	18
46	3	3	3	3	2	2	2	18
47	4	4	4	4	4	4	4	28
48	4	4	4	4	4	4	4	28

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTAL X2
1	2	3	3	4	3	3	3	21
2	2	3	3	4	3	3	3	21
3	1	4	2	5	3	5	3	23
4	1	4	2	5	3	5	3	23
5	3	3	3	4	3	3	2	21
6	2	4	3	3	4	3	2	21
7	2	4	4	4	2	4	2	22
8	4	4	4	3	4	4	2	25
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	4	4	4	4	4	4	2	26
11	4	3	2	3	3	5	4	24
12	4	3	2	3	3	5	4	24
13	4	4	5	3	5	4	3	28
14	4	4	5	3	4	4	3	27
15	2	3	3	3	3	3	3	20
16	2	3	3	3	3	3	3	20
17	4	4	4	4	4	4	4	28
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	2	3	5	4	4	2	2	22
20	2	3	2	4	2	4	4	21
21	4	4	4	5	5	5	1	28
22	4	4	4	5	5	5	1	28
23	3	3	3	3	3	3	3	21
24	3	3	3	3	3	3	3	21
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	5	3	4	3	5	3	28
28	5	5	3	4	3	5	3	28
29	3	5	1	5	1	5	1	21
30	3	5	1	5	1	5	1	21

31	4	4	4	4	4	4	4	28
32	4	4	4	4	4	4	4	28
33	5	5	3	4	3	5	3	28
34	5	5	3	4	3	5	3	28
35	5	5	3	3	3	3	3	25
36	5	5	3	3	3	3	3	25
37	2	5	2	5	2	5	1	22
38	2	5	2	5	2	5	1	22
39	3	5	3	5	3	5	3	27
40	3	5	3	5	3	5	3	27
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	4	5	3	5	3	5	3	28
44	4	5	3	5	3	5	3	28
45	3	3	3	3	3	3	3	21
46	3	3	3	3	3	3	3	21
47	3	5	3	5	3	5	2	26
48	3	5	3	5	3	5	2	26

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	TOTAL Y
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	4	3	4	5	3	19
4	4	3	4	5	3	19
5	4	3	3	3	3	16
6	4	3	3	3	3	16
7	4	2	3	4	3	16
8	4	3	3	4	3	17
9	4	4	4	4	3	19
10	4	4	4	3	3	18
11	5	2	5	5	3	20
12	5	2	5	5	3	20
13	4	3	4	4	2	17
14	4	3	4	4	2	17
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	5	2	4	4	2	17
18	5	2	4	4	2	17
19	4	3	3	3	2	15
20	4	3	3	3	2	15
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	3	3	15

24	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	4	3	19
26	4	4	4	4	3	19
27	4	2	5	5	2	18
28	4	2	5	5	2	18
29	3	2	3	3	2	13
30	3	2	3	3	2	13
31	5	5	4	4	3	21
32	5	5	4	4	3	21
33	4	3	5	5	3	20
34	4	3	5	5	3	20
35	4	3	4	4	2	17
36	4	3	4	4	2	17
37	4	1	4	4	1	14
38	4	1	4	4	1	14
39	3	3	5	5	3	19
40	3	3	5	5	3	19
41	4	3	4	4	4	19
42	4	3	4	4	4	19
43	4	4	3	3	3	17
44	4	4	3	3	3	17
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	3	3	15
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20

### Lampiran 3 Output Hasil Uji Statistik

#### PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

**X1\_1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	4.2	4.2	4.2
3	17	35.4	35.4	39.6
4	19	39.6	39.6	79.2
5	10	20.8	20.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

**X1\_2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	17	35.4	35.4	35.4
4	23	47.9	47.9	83.3
5	8	16.7	16.7	100.0
Total	48	100.0	100.0	

**X1\_3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	15	31.3	31.3	31.3
4	26	54.2	54.2	85.4
5	7	14.6	14.6	100.0
Total	48	100.0	100.0	

**X1\_4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	17	35.4	35.4	35.4
4	22	45.8	45.8	81.3
5	9	18.8	18.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

**X1\_5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	4.2	4.2	4.2
3	17	35.4	35.4	39.6
4	23	47.9	47.9	87.5
5	6	12.5	12.5	100.0
Total	48	100.0	100.0	

**X1\_6**



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	8.3	8.3	8.3
	3	13	27.1	27.1	35.4
	4	25	52.1	52.1	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

### X1\_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	8.3	8.3	8.3
	3	16	33.3	33.3	41.7
	4	22	45.8	45.8	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN

### X2\_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	4.2	4.2	4.2
	2	10	20.8	20.8	25.0
	3	11	22.9	22.9	47.9
	4	19	39.6	39.6	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
Total	48	100.0	100.0		

### X2\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	27.1	27.1	27.1
	4	19	39.6	39.6	66.7
	5	16	33.3	33.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

### X2\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	4.2	4.2	4.2
	2	7	14.6	14.6	18.8
	3	22	45.8	45.8	64.6
	4	14	29.2	29.2	93.8
	5	3	6.3	6.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

**X2\_4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	29.2	29.2	29.2
	4	20	41.7	41.7	70.8
	5	14	29.2	29.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

**X2\_5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	4.2	4.2	4.2
	2	4	8.3	8.3	12.5
	3	25	52.1	52.1	64.6
	4	14	29.2	29.2	93.8
	5	3	6.3	6.3	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

**X2\_6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.1	2.1	2.1
	3	12	25.0	25.0	27.1
	4	15	31.3	31.3	58.3
	5	20	41.7	41.7	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

**X2\_7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	12.5	12.5	12.5
	2	8	16.7	16.7	29.2
	3	22	45.8	45.8	75.0
	4	12	25.0	25.0	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****Y\_1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	25.0	25.0	25.0
	4	30	62.5	62.5	87.5
	5	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## Y\_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	4.2	4.2	4.2
	2	9	18.8	18.8	22.9
	3	25	52.1	52.1	75.0
	4	10	20.8	20.8	95.8
	5	2	4.2	4.2	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## Y\_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	18	37.5	37.5	37.5
	4	22	45.8	45.8	83.3
	5	8	16.7	16.7	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## Y\_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	17	35.4	35.4	35.4
	4	21	43.8	43.8	79.2
	5	10	20.8	20.8	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## Y\_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	4.2	4.2	4.2
	2	12	25.0	25.0	29.2
	3	28	58.3	58.3	87.5
	4	6	12.5	12.5	100.0
	Total	48	100.0	100.0	

## UJI REALIBILITAS

## X1

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	8

## X2

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.689	8

### Y1 Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.736	6

### UJI VALIDITAS

#### Correlations

		X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	TOTALX 1
X1_1	Pearson Correlation	1	.834**	.778**	.818**	.738**	.751**	.749**	.909**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_2	Pearson Correlation	.834**	1	.888**	.813**	.734**	.609**	.616**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_3	Pearson Correlation	.778**	.888**	1	.694**	.622**	.499**	.512**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_4	Pearson Correlation	.818**	.813**	.694**	1	.883**	.823**	.828**	.939**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_5	Pearson Correlation	.738**	.734**	.622**	.883**	1	.932**	.920**	.937**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_6	Pearson Correlation	.751**	.609**	.499**	.823**	.932**	1	.922**	.896**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X1_7	Pearson Correlation	.749**	.616**	.512**	.828**	.920**	.922**	1	.898**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
TOT ALX1	Pearson Correlation	.909**	.871**	.788**	.939**	.937**	.896**	.898**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Correlations

		X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	X2_7	TOTALX 2
X2_1	Pearson Correlation	1	.375**	.340**	-.204	.359**	.202	.286**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.009	.018	.165	.012	.169	.049	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_2	Pearson Correlation	.375**	1	-.165	.563**	-.213	.647**	-.299**	.507**
	Sig. (2-tailed)								
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

	Sig. (2-tailed)	.009		.262	.000	.147	.000	.039	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_3	Pearson Correlation	.340*	-.165	1	-.271	.829**	-.353*	.256	.518**
	Sig. (2-tailed)	.018	.262		.062	.000	.014	.079	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_4	Pearson Correlation	-.204	.563**	-.271	1	-.224	.668**	-.405**	.305
	Sig. (2-tailed)	.165	.000	.062		.127	.000	.004	.099
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_5	Pearson Correlation	.359*	-.213	.829**	-.224	1	-.185	.285*	.577**
	Sig. (2-tailed)	.012	.147	.000	.127		.208	.050	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_6	Pearson Correlation	.202	.647**	-.353*	.668**	-.185	1	-.180	.471**
	Sig. (2-tailed)	.169	.000	.014	.000	.208		.220	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X2_7	Pearson Correlation	.286*	-.299*	.256	-.405**	.285*	-.180	1	.337*
	Sig. (2-tailed)	.049	.039	.079	.004	.050	.220		.019
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
TOT ALX2	Pearson Correlation	.741**	.507**	.518**	.241	.577**	.471**	.337*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.099	.000	.001	.019	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

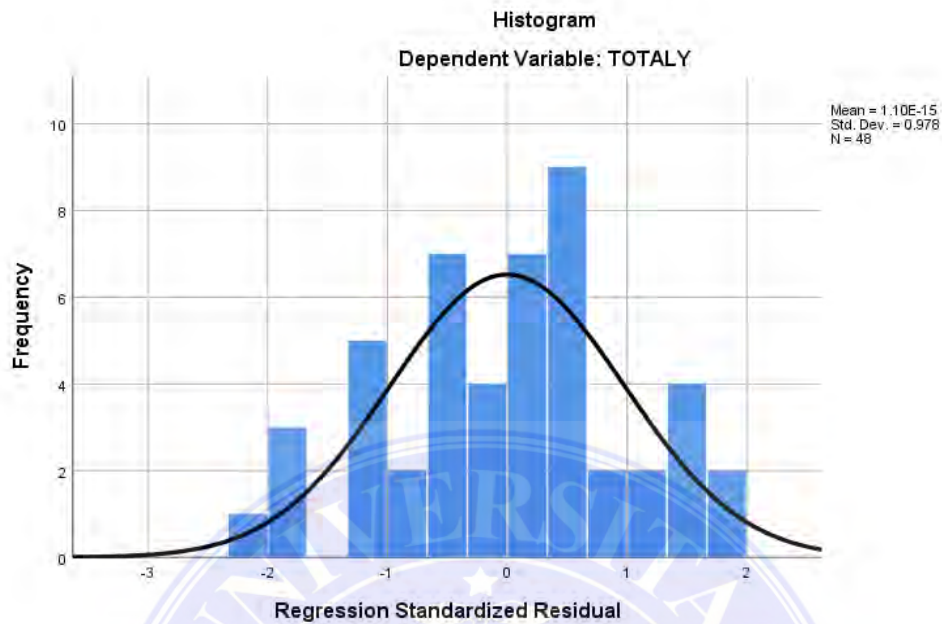
### Correlations

		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	TOTALY
Y_1	Pearson Correlation	1	.087	.431**	.431**	-.062	.571**
	Sig. (2-tailed)		.559	.002	.002	.678	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y_2	Pearson Correlation	.087	1	-.097	-.161	.630**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.559		.514	.274	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y_3	Pearson Correlation	.431**	-.097	1	.904**	-.003	.705**
	Sig. (2-tailed)	.002	.514		.000	.981	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y_4	Pearson Correlation	.431**	-.161	.904**	1	.022	.689**
	Sig. (2-tailed)	.002	.274	.000		.883	.000
	N	48	48	48	48	48	48
Y_5	Pearson Correlation	-.062	.630**	-.003	.022	1	.556**
	Sig. (2-tailed)	.678	.000	.981	.883		.000
	N	48	48	48	48	48	48
TOTALY	Pearson Correlation	.571**	.531**	.705**	.689**	.556**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48

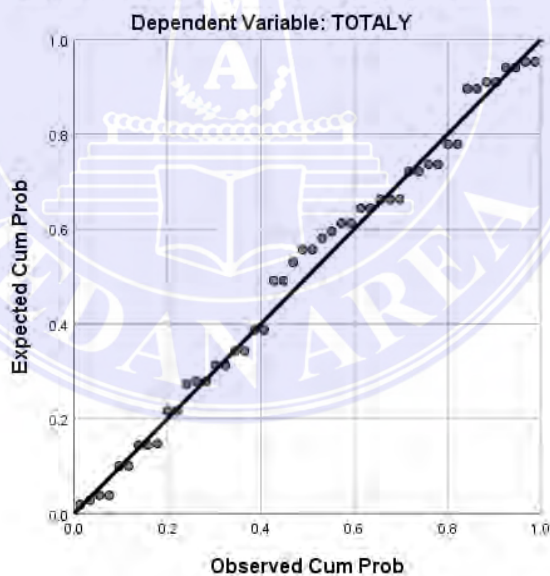
\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## UJI NORMALITAS



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



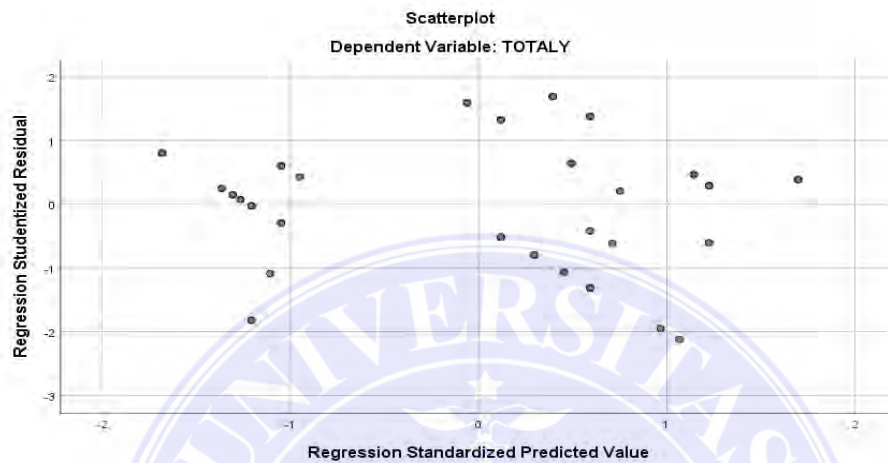
### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.12085028
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.051
	Negative	-.079
Test Statistic		.079

Asymp. Sig. (2-tailed) .200<sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

## UJI HETEROSKEDASTISITAS



## Lampiran 4

### Output Hasil Penelitian

#### UJI REGRESI LINIER BERGANDA

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.709	1.363		3.455	.001
	TOTALX1	.302	.055	.644	5.494	.000
	TOTALX2	.189	.084	.264	2.251	.029

a. Dependent Variable: TOTALLY

#### UJI PARSIAL (T)

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.709	1.363		3.455	.001
	TOTALX1	.302	.055	.644	5.494	.000
	TOTALX2	.189	.084	.264	2.251	.029

a. Dependent Variable: TOTALLY

#### UJI SIMULTAN (F)

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	171.620	2	85.810	65.397	.000 <sup>b</sup>
	Residual	59.046	45	1.312		
	Total	230.667	47			

a. Dependent Variable: TOTALLY

b. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

#### UJI DETERMINASI (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 <sup>a</sup>	.744	.733	1.145

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

## Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



### UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I - Jl. Nisan No. 1 Medan, Telp. (061) 789079, 789438, 734434, 734431, Fax. (061) 780099  
Kampus II - Jl. Sei Beraya No. 766/2 Suka Indah No. 708 Medan Telp. (061) 4025002, 4201994, Fax. (061) 421433  
Email: raih@medanarea.ac.id | Website: www.umma.ac.id | Email: info@medanarea.ac.id

---

Nomor : 01 / FEB.2 / 01.10 / 1 / 2020 31 Januari 2020  
 Lamp. :  
 Perihal : Izin Research / Survey

Kepada, Yth, Pimpinan  
 Seluruh Pimpinan OPD Kota PadangSidiempuan

Dicogan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,  
 menghargakan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama	: CHOIRUNNISA
N.P.M	: 160330114
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah PadangSidiempuan

Untuk diberi Izin Research / survey di Instansi / Perusahaan yang Saudara pimpin, Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami tambahkan bahwa Research / survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan ker. sudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
 Teddi Prihadi, SE, MM

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Bertinggal



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
(JL. JEND. BESAR ABDUL HARRIS NASUTION TELEPON (0654) 7366414 PAL. IV PUSIR KOLING  
 PADANGSIDIMPUAN

---

**IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR : 070/44/KKBP/2020**  
**TENTANG**  
**IZIN PENELITIAN**

**Dasar**

- a. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan,
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
- d. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pen dele gasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan,
- e. Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Nomor: 974/FEB.2/01.10/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal mohon izin Penelitian An-CHOIRUNNISA

**MEMBERI IZIN KEPADA:**

**NAMA** : CHOIRUNNISA  
**NIM** : 168330114  
**ALAMAT** : Jl. IMAM BONJOL Gg. BENGKEL NO. 30 KELURAHAN WEK V KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN  
**JUDUL PENELITIAN** : "PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN"  
**LOKASI PENELITIAN** : WILAYAH KERJA OPD KOTA PADANGSIDIMPUAN  
**LAMA PENELITIAN** : Tanggal 17 Februari s/d 08 Maret 2020  
**ANGGOTA PENELITIAN** : 1 Satu (Orang)  
**PENANGGUNG JAWAB** : TEDDI PRIBADI SE, MM

Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset/ditaksud yang bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil penelitian kepada Walikota Padangsidempuan Up Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan  
 Demikian izin Penelitian ini dibenarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
 Ditetapkan di : Padangsidempuan  
 Pada tanggal : 25 Februari 2020  
 An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**




**ALFIAN S. Sos, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19690625 199803 1 007**

**Terbusan:**

1. Bapak Walikota Padangsidempuan (sebagai laporan)
2. Bapak/ Ibu Pimpinan OPD Se- Kota Padangsidempuan
3. Sdr/ I Teddi Pribadi SE, MM (Penanggung jawab)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



## Lampiran 6 Surat Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
JL. JEND. BEMAR AROUCU KORO NASUTION TELEPON (PADA) YEMALA PAL. JU. PAUJ. KANTOR  
PADANGSIDIMPUAN

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR: 070/Sp/KKBP/2020


1. Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Kota Padangsidempuan Nomor: 070/365/KKBP/2020 tanggal 28 Februari 2020, dengan ini memberikan keterangan kepada nama di bawah ini

NAMA	CHOIRUNNISA
NIM	168330114
ALAMAT	Jl. IMAM BONJOL Gg. BENGKEL NO. 30 KELURAHAN WEK V KEC. PADANGSIDIMPUAN SELATAN
JUDUL PENELITIAN	"PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADANGSIDIMPUAN"
LOKASI PENELITIAN	WILAYAH KERJA OPD KOTA PADANGSIDIMPUAN
PENANGGUNG JAWAB	TEDDI PRIBADI SE. MM

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian di Wilayah Kerja OPD Kota Padangsidempuan dan telah menyerahkan 1 (satu) set soft copy Hasil Penelitian.

2. Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padangsidempuan  
Pada Tanggal 10 Agustus 2020  
An. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

  
**ALFIAN, S.Sos, MM**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19690625 199803 1 007.

Tersusun:

1. Bapak Walikota Padangsidempuan (sebagai laporan)
2. Bapak/Ibu Pemimpin OPD Se- Kota Padangsidempuan
3. Sidra/ Teddi Pribadi SE. MM (Pemanggung Jawab)
4. Yang Bersangkutan
5. Anis